

AGRAPANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 1, No. 2, Juli, 2024

Tersedia online di: <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

Pengaruh Kebijakan “Open Door Policy” terhadap Pergeseran Sosial dan Politik di Jerman

Estadeo Nurido Andiyani¹, Nensy Triristina², Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Darul 'Ulum

*korespondensi: deonurido@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Jerman pada tahun 2015 terhadap perubahan sosial dan politik di negara tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dari negara-negara yang mengalami konflik, namun menimbulkan ketegangan sosial antara kelompok pro dan kontra imigrasi. Penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi lanskap politik, terutama dengan meningkatnya dukungan terhadap partai populis sayap kanan seperti *Alternative für Deutschland* (AfD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *Open Door Policy* memberikan tantangan besar bagi stabilitas sosial dan politik di Jerman, dan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengatasi masalah yang muncul, baik dari segi integrasi sosial pengungsi maupun keamanan nasional.

Kata kunci: *open door policy*; imigrasi; integrasi sosial; politik Jerman; AfD

Abstract

This study analyzes the impact of Germany's Open Door Policy, implemented in 2015, on social and political changes within the country. The policy aimed to provide protection to refugees from conflict-affected nations but triggered social tensions between pro- and anti-immigration groups. This research also evaluates the political ramifications of the policy, particularly the rise in support for right-wing populist parties like Alternative für Deutschland (AfD). The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach, utilizing secondary data from credible sources. The findings indicate that the Open Door Policy presents significant challenges to Germany's social and political stability, necessitating a more integrated approach to address issues concerning refugee social integration and national security.

Keyword: *open door policy*; immigration; social integration; German politics; AfD

PENDAHULUAN

Kebijakan yang diterapkan di suatu negara dapat mempengaruhi kondisi masyarakat di negara tersebut, penerapan suatu kebijakan bertujuan menyelesaikan suatu masalah dan diharapkan hasil dari penerapannya membawa dampak positif, namun tak jarang beberapa kebijakan malah membawa dampak negatif bagi negara tersebut. Pengambilan kebijakan berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan pada upaya penyelesaian isu permasalahan yang berkembang di masyarakat suatu negara (Khasanah, 2022). Implementasi kebijakan sangat diperlukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Daniel Mazmania dan Paul Sabatier dalam mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Maunde, Posumah and Kolondam 2021). Pada tahun 2015, kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Jerman membuka pintu bagi ratusan ribu pengungsi yang mencari perlindungan dari konflik di Timur Tengah dan Afrika. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Kanselir Angela Merkel, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi mereka yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Namun, meskipun niat di balik 2 kebijakan ini adalah mulia, dampak yang dihasilkannya membawa konsekuensi

besar terhadap kondisi sosial dan politik di Jerman.

Sejak penerapan kebijakan tersebut, Jerman mengalami lonjakan jumlah imigran yang masuk ke negara tersebut. Banyak dari imigran ini berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan, yang menghadapi situasi yang sangat sulit di negara asal mereka. Menurut laporan dari *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (BAMF), pada puncak krisis pengungsi, Jerman menerima lebih dari satu juta permohonan suaka pada tahun 2015 saja (BAMF, 2016). Peningkatan jumlah pendatang ini menciptakan tantangan besar bagi sistem sosial dan ekonomi Jerman.

Salah satu dampak signifikan dari kebijakan *Open Door Policy* adalah peningkatan tingkat kriminalitas dan terorisme yang melibatkan imigran. Menurut laporan dari Kantor Federal Kriminalitas (BKA), terdapat peningkatan dalam kejahatan yang dilakukan oleh dan terhadap imigran (BKA, 2017). Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Jerman tentang keamanan mereka dan mendorong perdebatan tentang efektivitas kebijakan tersebut. Insiden kekerasan dan serangan teroris yang melibatkan beberapa imigran menambah ketegangan dan ketakutan di masyarakat.

Ketidakpuasan warga Jerman terhadap kebijakan *Open Door Policy* juga tercermin dalam perubahan sosial dan politik yang terjadi. Banyak warga merasa bahwa kedatangan imigran dalam jumlah besar telah mengganggu keseimbangan sosial dan budaya yang ada. Hasil survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa mayoritas warga Jerman merasa tidak nyaman dengan jumlah pengungsi yang besar dan percaya bahwa kebijakan ini telah meningkatkan risiko terorisme. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya gerakan populis dan nasionalis yang

semakin kuat. 3 Perubahan sosial yang terjadi akibat kebijakan ini juga mempengaruhi dinamika politik di Jerman. Partai-partai politik yang mengusung agenda antiimigrasi, seperti Alternative für Deutschland (AfD), mengalami peningkatan dukungan yang signifikan. Dalam pemilihan umum tahun 2017, AfD berhasil meraih kursi di Bundestag, menjadikannya partai sayap kanan pertama yang masuk parlemen dalam beberapa dekade (BBC News, 2017). Kebangkitan AfD mencerminkan reaksi balik dari masyarakat yang merasa terancam oleh perubahan demografis dan kebijakan imigrasi pemerintah.

Kebijakan *Open Door Policy* juga menyebabkan pergeseran dalam kebijakan pemerintah terkait integrasi dan keamanan. Pemerintah Jerman mengadopsi langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengawasi imigran dan memastikan bahwa mereka dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Jerman. Program-program integrasi diperluas, dan undang-undang yang lebih keras diberlakukan untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh imigran (Deutscher Bundestag, 2018). Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons kekhawatiran masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Kebijakan *Open Door Policy* tidak hanya mempengaruhi Jerman secara internal, tetapi juga memiliki implikasi regional dan internasional. Negara-negara tetangga di Eropa menghadapi tantangan serupa dalam menanggulangi krisis pengungsi dan mengelola dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik. Uni Eropa harus berkoordinasi dalam kebijakan imigrasi dan integrasi untuk memastikan bahwa beban pengungsi didistribusikan secara merata dan tidak menyebabkan ketegangan

antarnegara anggota (European Commission, 2016).

Secara politik, *Open Door Policy* juga berdampak pada lanskap politik 4 Jerman. Partai-partai politik harus menyesuaikan platform dan kebijakan mereka untuk merespons perubahan demografis dan tuntutan sosial yang baru. Partai seperti Alternatif untuk Jerman (AfD) mendapatkan dukungan yang signifikan dari kelompok yang merasa terancam oleh kebijakan imigrasi yang liberal, sementara partai lain seperti Partai Hijau dan Sosial Demokrat mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif dan progresif (Weber, 2020). Pergeseran politik ini menunjukkan bagaimana *Open Door Policy* dapat mempengaruhi stabilitas dan dinamika politik nasional.

Dampak kebijakan ini juga terlihat dalam konteks ekonomi. Penerimaan imigran dan pekerja asing telah membantu Jerman mengatasi tantangan ekonomi, seperti kekurangan tenaga kerja dan penuaan populasi. Selain itu, keberagaman tenaga kerja juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam sektor industri dan jasa. Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan tantangan dalam memastikan kesempatan kerja yang adil dan mengatasi diskriminasi di tempat kerja (Bauder, 2017). Dengan demikian, *Open Door Policy* memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi Jerman.

Open Door Policy juga berdampak pada hubungan internasional Jerman. Sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di Uni Eropa, Jerman harus menyeimbangkan kebijakan nasionalnya dengan komitmen internasional. *Open Door Policy* telah meningkatkan posisi Jerman sebagai negara yang ramah dan terbuka terhadap migran, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara

anggota Uni Eropa lainnya yang memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan imigrasi (Givens & Luedtke, 2005). Oleh karena itu, Jerman harus memainkan peran diplomatik yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

Dalam konteks sosial, *Open Door Policy* juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang identitas nasional. Dengan meningkatnya keberagaman budaya, masyarakat Jerman harus beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pendidikan, budaya, dan interaksi sosial. Perubahan ini dapat memperkaya kehidupan budaya, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik (Esser, 2016). Pentingnya dialog dan kebijakan inklusif menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang meningkat. *Open Door Policy* di Jerman telah membawa dampak yang luas dan kompleks terhadap perubahan sosial dan politik. Meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, kebijakan ini juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan hubungan internasional yang lebih kuat. Dengan memahami dinamika yang ada, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut dampak *Open Door Policy* terhadap pergeseran sosial dan politik di Jerman, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini (Münz & Ulrich, 2017).

Pemilihan topik ini mencerminkan pentingnya menganalisis dampak kebijakan domestik pada posisi internasional Jerman. Kebijakan *Open Door Policy* tidak hanya mempengaruhi

masyarakat dan politik dalam negeri, tetapi juga menciptakan persepsi dan reaksi di tingkat internasional. Kebijakan ini dapat mempengaruhi aliansi politik dan kerja sama multilateral. Dengan fokus pada hubungan internasional, penelitian ini dapat mengkaji bagaimana *Open Door Policy* berkontribusi pada citra Jerman sebagai negara yang terbuka dan inklusif serta bagaimana hal ini mempengaruhi interaksi Jerman dengan mitra internasionalnya. Judul ini juga menekankan pentingnya memahami kebijakan imigrasi dalam konteks internal yang lebih luas, di mana kebijakan domestik dan stabilitas sosial serta politik saling berinteraksi dan mempengaruhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial serta politik yang terjadi di Jerman akibat penerapan kebijakan *Open Door Policy*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelami kedalaman isu-isu yang kompleks, serta untuk menggambarkan dinamika sosial yang muncul dari kebijakan imigrasi tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis mendalam terhadap data sekunder yang relevan, yang mencakup berbagai sumber informasi yang dapat memberikan wawasan tentang perubahan yang terjadi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara kebijakan imigrasi dan dampak sosial politik yang timbul, dengan merujuk pada literatur serta data yang ada.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang sistematis dan pemanfaatan data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, artikel berita, hasil survei, serta laporan resmi yang membahas

dampak kebijakan *Open Door Policy* di Jerman. Proses pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, dengan menyaring sumber-sumber yang kredibel dan relevan untuk memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang akan dilakukan. Pemilihan data yang tepat sangat penting, karena kualitas dan keakuratan informasi akan menentukan keandalan hasil penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan utama yang dirancang untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kebijakan *Open Door Policy* terhadap pergeseran sosial dan politik di Jerman. Pertama, analisis konten akan diterapkan untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari studi literatur, analisis media, dan dokumentasi resmi. Melalui teknik ini, peneliti akan mengidentifikasi dan mengkode tema-tema utama, pola, serta tren yang muncul dari teks yang telah dikumpulkan, seperti artikel berita dan laporan resmi. Dengan menganalisis konten secara sistematis, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan ini diberitakan, dikritik, dan dipersepsikan di berbagai platform media, serta bagaimana respons tersebut mencerminkan perubahan sosial dan politik yang terjadi.

Analisis deskriptif akan digunakan untuk menilai data yang tersedia, termasuk statistik pemerintah dan laporan dari organisasi internasional. Teknik ini melibatkan analisis tren dan pola dalam data, untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap struktur sosial dan politik. Dengan membandingkan data dari periode sebelum dan setelah penerapan kebijakan, peneliti dapat mengukur perubahan signifikan yang mungkin terjadi akibat kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan

Open Door Policy mempengaruhi masyarakat dan sistem politik di Jerman.

Analisis juga akan dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dan laporan resmi terkait *Open Door Policy*. Teknik ini melibatkan penilaian mendalam terhadap dokumen administratif dan kebijakan yang relevan, dengan tujuan untuk memahami pelaksanaan kebijakan serta efek yang diantisipasi. Dengan menelaah dokumen-dokumen ini, peneliti akan memperoleh wawasan tentang niat kebijakan, strategi implementasi, dan evaluasi dampak yang mungkin tidak terungkap dalam media atau literatur lainnya. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat Jerman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Open Door Policy* di Jerman telah menjadi subjek perdebatan yang luas terkait dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik negara tersebut. Salah satu aspek paling kontroversial adalah tingkat kriminalitas yang dilaporkan meningkat sejak kebijakan ini diimplementasikan. Laporan kriminalitas di Jerman memperlihatkan korelasi yang signifikan antara arus masuk imigran dengan peningkatan kejahatan kecil seperti pencurian dan kekerasan. Banyak pihak berargumen bahwa masuknya imigran yang kurang berasimilasi dengan budaya setempat meningkatkan risiko kriminalitas, meskipun beberapa penelitian memperlihatkan bahwa korelasi ini lebih disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi daripada faktor kehadiran imigran itu sendiri (Schneider et al., 2017).

Kebijakan tersebut juga dianggap telah meningkatkan potensi aksi terorisme di Jerman. Arus masuk imigran dari negara-negara yang sedang berkonflik, terutama dari Timur Tengah

dan Afrika Utara, dikaitkan dengan masuknya individu-individu yang terlibat dalam ekstremisme. Beberapa serangan teroris yang terjadi di Jerman pada pertengahan dekade 2010-an dilaporkan dilakukan oleh pelaku yang baru saja memasuki Jerman sebagai pencari suaka (Mudde, 2016). Kebijakan yang longgar dalam memproses suaka dinilai memberikan celah bagi kelompok ekstremis untuk menyusup dan menyebarkan ideologi radikal di kalangan pendatang dan penduduk lokal.

Implikasi kebijakan *Open Door Policy* juga terlihat pada peningkatan tingkat pengangguran di beberapa daerah. Meskipun imigran diharapkan bisa mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor yang tidak diminati oleh 38 penduduk lokal, kenyataannya sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor seperti kurangnya keterampilan dan kesenjangan bahasa menjadi penghalang utama bagi imigran untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja Jerman yang relatif tinggi standarnya (Brücker & Rother, 2018). Hal ini memicu ketidakstabilan sosial, di mana persaingan untuk pekerjaan semakin ketat dan menyebabkan friksi antara imigran dan penduduk lokal.

Lebih jauh lagi, dampak kebijakan ini juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat Jerman. Masuknya imigran dalam jumlah besar menyebabkan perubahan demografis yang signifikan di berbagai wilayah. Kota-kota yang sebelumnya homogen secara etnis kini menjadi lebih beragam, namun perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan antara kelompok etnis menjadi semakin nyata, dengan beberapa kelompok masyarakat merasa terancam oleh perubahan identitas budaya yang berlangsung cepat (Huntington, 2004). Imigran seringkali dianggap sebagai

beban sosial oleh sebagian masyarakat lokal, yang melihat mereka sebagai pesaing dalam mendapatkan fasilitas umum seperti perumahan dan layanan kesehatan.

Tantangan terbesar dari kebijakan *Open Door Policy* adalah bagaimana pemerintah Jerman menghadapi pergolakan politik yang muncul sebagai akibat dari pergeseran sosial yang terjadi. Partai-partai sayap kanan, seperti AfD (*Alternative für Deutschland*), mendapatkan momentum dalam politik Jerman dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap imigran. AfD menggunakan isu imigrasi sebagai alat kampanye untuk mendapatkan dukungan, dengan menekankan pada kebutuhan untuk memperketat kebijakan perbatasan dan meningkatkan 39 keamanan nasional (Wodak, 2015). Kebijakan imigrasi yang longgar dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional, dan hal ini telah menyebabkan peningkatan sentimen nasionalisme di kalangan warga Jerman.

Konflik sosial juga semakin meningkat di lingkungan masyarakat Jerman, di mana kelompok-kelompok lokal mulai menunjukkan resistensi terhadap integrasi imigran. Di beberapa daerah, imigran merasa terisolasi dan terpinggirkan, yang memperburuk ketegangan sosial. Ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar antara imigran dan penduduk lokal, dan jika tidak segera diatasi, hal ini bisa berdampak buruk pada kohesi sosial dalam jangka panjang (Voss, 2019). Pemerintah Jerman harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memfasilitasi integrasi imigran, seperti menyediakan pendidikan bahasa dan pelatihan keterampilan, agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat Jerman.

Selain itu, kebijakan ini juga memengaruhi hubungan internasional

Jerman. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Uni Eropa, Jerman kerap kali menjadi tujuan utama bagi para pencari suaka. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga yang merasa bahwa Jerman memikul beban terlalu besar dalam menampung imigran, sementara negara-negara lain cenderung bersikap lebih konservatif dalam menerima imigran (Schimmelfennig & Sedelmeier, 2017). Ketidakseimbangan ini menimbulkan friksi di antara negaranegara anggota Uni Eropa dalam hal tanggung jawab bersama terkait krisis migrasi.

Terakhir, pergeseran sosial yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan Open Door Policy juga berimplikasi pada identitas nasional Jerman. Sebagian masyarakat Jerman merasa bahwa kebijakan ini melemahkan identitas tradisional Jerman yang 40 selama ini berbasis pada etnisitas dan budaya Eropa Barat. Kekhawatiran ini menciptakan polarisasi dalam masyarakat, di mana sebagian warga menginginkan pelestarian identitas nasional, sementara yang lain lebih menerima pluralitas budaya sebagai bagian dari perkembangan global (Dahrendorf, 2016). Pergeseran ini membawa tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat inklusif tetapi juga mampu mempertahankan kohesi nasional di tengah perubahan demografis yang terjadi.

Secara keseluruhan, kebijakan *Open Door Policy* telah memicu dampak sosial dan politik yang signifikan di Jerman. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan mulia untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, tantangan-tantangan yang muncul, terutama dalam hal kriminalitas, pengangguran, dan pergeseran identitas sosial, memerlukan

perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial di masa depan.

- a) Kriminalitas: Berdasarkan data dari *Federal Criminal Police Office of Germany (Bundeskriminalamt)*, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2016, ketika Jerman menerima lebih dari 1 juta pencari suaka, terjadi peningkatan signifikan dalam laporan kriminalitas yang melibatkan imigran. Studi oleh Pfeiffer (2017) menunjukkan bahwa meskipun jumlah kejahatan yang dilakukan oleh imigran lebih rendah dibandingkan jumlah total penduduk, terdapat lonjakan pada jenis kejahatan tertentu seperti pencurian, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Namun, Pfeiffer juga menekankan bahwa faktor seperti kemiskinan dan isolasi sosial lebih berkontribusi terhadap peningkatan ini dibandingkan dengan asal-usul imigran itu sendiri. 41
- b) Terorisme: Menurut laporan dari *Global Terrorism Database* (2019), serangan teroris yang terjadi di Jerman antara tahun 2015 dan 2018, seperti serangan pasar Natal di Berlin (2016), dilakukan oleh pelaku yang telah memasuki Jerman sebagai pengungsi. Dalam kasus tersebut, pelaku memiliki hubungan dengan jaringan ekstremis internasional, menunjukkan adanya risiko bahwa kebijakan perbatasan yang longgar dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Namun demikian, studi dari *European Union Terrorism Situation and Trend Report* (Europol, 2018) menekankan bahwa tindakan pencegahan oleh aparat keamanan Jerman berhasil mengurangi ancaman terorisme secara keseluruhan.
- c) Pengangguran: Data dari *German Federal Employment Agency* (2017) menunjukkan bahwa tingkat

pengangguran di kalangan imigran, terutama pencari suaka dari Suriah, Irak, dan Afghanistan, mencapai lebih dari 40% pada tahun 2016. Imigran sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan bahasa dan keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja Jerman. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran nasional pada waktu itu hanya sekitar 4%. Hal ini menimbulkan masalah ekonomi bagi negara, terutama dalam hal beban pada sistem kesejahteraan sosial (Brücker & Rother, 2018).

- d) Pergeseran Sosial: Data dari *Pew Research Center* (2017) menunjukkan bahwa 58% masyarakat Jerman merasa bahwa imigrasi membawa dampak negatif pada kehidupan mereka, terutama di wilayah-wilayah di mana jumlah imigran meningkat drastis. Survei ini menunjukkan adanya peningkatan sentimen anti-imigran, yang dimanfaatkan oleh partai-partai sayap kanan seperti *Alternative für Deutschland* (AfD) dalam pemilu federal tahun 2017. AfD berhasil mendapatkan 12.6% suara, menjadikannya partai terbesar ketiga di Bundestag, dengan platform kampanye yang berfokus pada penolakan terhadap imigrasi massal.
- e) Hubungan Internasional: Dalam konteks hubungan internasional, laporan dari *European Commission* (2016) memperlihatkan bahwa Jerman mengalami ketegangan diplomatik dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama di Eropa Timur, terkait distribusi pengungsi. Negara-negara seperti Hungaria dan Polandia menolak kuota pengungsi yang diusulkan oleh Uni Eropa, sementara Jerman terus menampung jumlah yang signifikan, yang menyebabkan

ketegangan dalam kebijakan luar negeri terkait solidaritas di Uni Eropa.

Pergeseran Sosial

Peningkatan Ekstremisme Sayap Kanan

Seiring dengan penerapan kebijakan *Open Door Policy* di Jerman, muncul dampak sosial yang signifikan berupa peningkatan gerakan ekstremis sayap kanan. Gerakan seperti PEGIDA (*Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West*) dan partai politik sayap kanan *Alternative für Deutschland* (AfD) mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam masyarakat. Menurut penelitian Mudde (2018), pertumbuhan ini terkait dengan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu longgar. Kelompok sayap kanan sering kali mengaitkan imigrasi dengan peningkatan kejahatan dan ancaman terhadap identitas nasional Jerman, yang memperkuat narasi mereka. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam kekerasan dan aksi terorisme yang ditargetkan terhadap kelompok minoritas, terutama imigran Muslim. Data dari *German Federal Ministry of the Interior* (2019) menunjukkan bahwa sejak 2015, serangan terhadap pusat pengungsi, masjid, dan imigran meningkat drastis. Insiden kekerasan berbasis kebencian naik sebesar 40% antara 2015 dan 2018, dengan sebagian besar serangan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok terkait dengan ideologi sayap kanan (Baier et al., 2018). Laporan terbaru dari Badan Intelijen Domestik Jerman (BfV) juga mencatat peningkatan ekstremisme sayap kanan sebesar 4.6%, mencapai 40.600 orang pada tahun 2024, dengan 14.500 di antaranya dianggap berpotensi melakukan kekerasan (Şimşek, 2024).

Kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan ini semakin terorganisir

dalam meningkatkan radikalisasi dan memanfaatkan isu-isu seperti migrasi dan ketegangan internasional untuk membangkitkan ketakutan di masyarakat. Penggunaan media sosial menjadi salah satu platform utama untuk menyebarkan propaganda yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Selain itu, laporan dari BfV menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis sayap kanan naik sebesar 13%, dengan 1.016 insiden yang berakibat pada cedera fisik serius, termasuk empat percobaan pembunuhan (Şimşek, 2024). Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi keamanan domestik Jerman, mengingat potensi ancaman dari kelompok-kelompok ini.

Di sisi lain, pemerintah Jerman telah meningkatkan pengawasan terhadap kelompok ekstremis ini dan terus melakukan upaya pencegahan kekerasan. Namun, peningkatan intensitas kekerasan menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih agresif. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan sangat penting dalam upaya memantau dan menangani ancaman ini. pemerintah Jerman juga mulai memperkuat kerangka hukum dan program deradikalisasi untuk menangani radikalisasi di kalangan ekstremis sayap kanan.

Tabel 1

Respon Responden terhadap Kebijakan Imigrasi

Kategori Responden	Setuju Kebijakan Imigrasi Positif (%)	Tidak Setuju Kebijakan Imigrasi Positif (%)
Penduduk Jerman Barat	40%	60%
Penduduk Jerman Timur	25%	75%
Kelompok Penghasilan Rendah	20%	80%

Kelompok Penghasilan Tinggi	55%	45%
Responden yang Mendukung AfD	15%	85%
Penduduk Responden yang Mendukung CDU	50%	50%

Secara keseluruhan, pergeseran sosial yang terjadi di Jerman terkait dengan kebijakan imigrasi telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam ekstremisme sayap kanan. Survei terbaru dari *Democracy Perception Index* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jerman mendesak pemerintah untuk memperketat kebijakan migrasi, dengan 44% responden yang menginginkan pengurangan tingkat migrasi (Deutsche Presse-Agentur, 2024). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tren global, di mana hanya 16% populasi dunia yang menganggap pengurangan migrasi sebagai prioritas utama. Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam prioritas kebijakan publik di Jerman, dan memberikan gambaran bahwa isu migrasi menjadi titik fokus yang semakin penting dalam politik domestik negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman juga telah mengalami peningkatan signifikan dalam sentimen anti-imigrasi, seperti yang terungkap dalam berbagai survei dan studi. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam pandangan publik terhadap migrasi dan pengungsi, yang mencerminkan ketegangan sosial 61 dan politik di negaratersebut.

Sebagai salah satu negara

dengan arus migrasi yang besar di Eropa, Jerman menghadapi tantangan dalam mengelola sikap publik yang semakin negatif terhadap imigran dan pengungsi. Survei terbaru oleh *Friedrich-Ebert Stiftung* menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi Jerman, yaitu 54,1%, memiliki pandangan negatif terhadap pencari suaka. Angka ini jauh melampaui puncak krisis migrasi pada tahun 2015-2016, saat ketegangan terkait migrasi mencapai

tingkat yang tinggi.

Peningkatan sikap negatif ini muncul meskipun jumlah kedatangan migran menurun secara signifikan sejak saat itu, menunjukkan bahwa masalah ini lebih dari sekadar masalah kuantitas, melainkan juga terkait dengan persepsi dan pengalaman sosial.

Peningkatan sentimen anti-imigrasi ini tidak terbatas pada wilayah tertentu di Jerman. Studi menunjukkan bahwa sikap negatif terhadap pencari suaka sangat dominan di wilayah timur Jerman, di mana dua pertiga dari responden mengungkapkan pandangan negatif. Hal ini kontras dengan wilayah barat Jerman, di mana sikap tersebut tidak sekuat di timur. Faktor-faktor seperti sejarah, kondisi ekonomi, dan tingkat integrasi sosial memainkan peran dalam mempengaruhi pandangan ini.

Selain itu, survei oleh *Leibniz Centre for European Economic Research* (ZEW) mengonfirmasi bahwa tingkat kejahatan kebencian terhadap pencari suaka lebih tinggi di bagian timur Jerman dibandingkan di barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap imigrasi sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial, seperti pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, yang dapat memperburuk sikap negatif terhadap imigran. Di tingkat kebijakan, Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk

mengatasi arus migrasi dan memperketat kebijakan imigrasi. Kebijakan ini termasuk hak deportasi bagi pencari suaka yang ditolak dan pembatasan visa reuni keluarga. Pemerintah Jerman juga berencana untuk mengurangi pendanaan untuk pengungsi, yang akan membuat proses mendapatkan suaka semakin sulit. Langkah-langkah ini mencerminkan respons terhadap tekanan publik dan meningkatnya sikap anti-imigrasi.

Studi terbaru telah mengungkapkan adanya peningkatan ketidakpuasan di kalangan remaja Jerman yang mendorong mereka untuk mempertimbangkan dukungan terhadap partai sayap kanan, khususnya partai *Alternative for Germany* (AfD). Survei yang dilakukan oleh *Youth in Germany 2024* pada Januari dan Februari 2024 menunjukkan bahwa sekitar 22% dari pemuda berusia 14 hingga 29 tahun berencana untuk memilih AfD jika pemilihan umum diadakan saat ini. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan dua tahun lalu yang hanya mencapai 9%. Temuan ini mencerminkan pergeseran besar dalam preferensi politik di kalangan generasi muda, yang sebelumnya mungkin kurang tertarik pada ekstremisme politik.

Peningkatan ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh berbagai masalah sosial dan ekonomi yang semakin memburuk. Di antara kekhawatiran yang paling mendominasi adalah inflasi tinggi, biaya sewa yang melambung, dan kekhawatiran akan kemiskinan di masa tua. Survei menunjukkan bahwa 65% remaja merasa khawatir tentang inflasi, 54% tentang biaya perumahan, dan 48% mengenai potensi kemiskinan di masa tua. Hal ini menandakan bahwa isu-isu ekonomi kini telah menggantikan kekhawatiran sebelumnya terkait perubahan iklim, yang

pernah menjadi perhatian utama. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap keadaan ekonomi saat ini memicu minat yang lebih besar terhadap ide-ide populis yang ditawarkan oleh AfD.

Di samping itu, meningkatnya kekhawatiran mengenai migrasi juga menjadi faktor penting yang berkontribusi pada dukungan terhadap AfD. Sekitar 41% responden muda menyatakan bahwa masalah migrasi adalah isu utama yang mereka hadapi. Dengan platform anti-imigrasi AfD yang semakin populer di kalangan generasi muda, partai tersebut berhasil menarik perhatian mereka yang merasa terancam oleh perubahan sosial yang diakibatkan oleh migrasi. Penurunan dukungan untuk partai-partai tradisional, seperti Partai Hijau dan Partai Demokratik Bebas (FDP), mencerminkan pergeseran ini, sementara dukungan terhadap CDU/CSU dan aliansi populis baru yang dipimpin oleh Sahra Wagenknecht meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas *Bielefeld* dan dipesan oleh Yayasan *Friedrich Ebert* mengindikasikan bahwa sikap ekstrem kanan di Jerman semakin meningkat. Survei ini, bagian dari penelitian jangka panjang yang dimulai pada tahun 2002, menunjukkan bahwa sekitar 8% responden kini memiliki pandangan ekstrem kanan yang jelas, meningkat signifikan dari hanya 2-3% dalam survei sebelumnya. Temuan ini menunjukkan adanya lonjakan dukungan untuk ideologi ekstrem kanan di kalangan masyarakat Jerman. Selain itu, survei tersebut juga mencatat bahwa sekitar 5-7% dari seluruh kelompok usia di Jerman mendukung ide-ide otoriter, yang dua kali lipat dari rata-rata jangka panjang. Peningkatan ketidakpuasan sosial dan ekonomi terutama dirasakan oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 48% dari mereka yang

berpenghasilan rendah merasa terdampak oleh krisis yang sedang berlangsung, dibandingkan dengan 27,5% dari mereka yang berpenghasilan menengah dan hanya 14,5% dari mereka yang berpenghasilan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang lebih besar berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang sulit, dan semakin banyak orang yang mencari solusi dalam ideologi ekstrem yang menawarkan janji-janji populis.

Kepercayaan pada institusi pemerintah dan pada fungsi demokrasi juga mengalami penurunan. Meskipun mayoritas besar masih mendukung bentuk pemerintahan demokratis, sekitar 38% responden memiliki pandangan yang sejalan dengan teori konspirasi, 33% memiliki pandangan populis, dan 29% menunjukkan sikap etnonasionalis-otoriter. Skeptisisme terhadap media tradisional juga meningkat, dengan 32% responden percaya bahwa media berkolusi dengan politisi, sebuah peningkatan dari 24% dua tahun lalu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa krisis yang terjadi, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan masalah sosial-ekonomi lainnya, telah memicu penurunan kepercayaan dan menyebabkan banyak orang mengadopsi sikap anti-demokrasi.

Gerakan *Reichsbürger*, yang menolak pengakuan terhadap negara Jerman saat ini dan mendukung ide-ide otoriter, juga semakin mendapat perhatian. Kelompok ini percaya bahwa perbatasan Kekaisaran Jerman tahun 1871 masih berlaku dan telah membentuk sel teror untuk melawan struktur demokratis Jerman. Kemunculan sikap ekstrem kanan ini mengingatkan pada masa lalu ketika ideologi ekstrem, seperti Nazisme, muncul dari tengah masyarakat. Peneliti Andreas Zick mencatat bahwa krisis sering kali memicu perubahan sikap politik, di

mana banyak orang yang sebelumnya tidak dianggap ekstremis mulai mengadopsi pandangan ekstrem kanan, yang dapat mengancam demokrasi.

Laporan tahunan oleh Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, juga menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh kekerasan ekstrem kanan, ekstremisme Islamis, dan serangan siber dari negara-negara seperti Rusia dan China terhadap demokrasi Jerman. Meskipun demokrasi Jerman tetap kuat, tekanan dari ancaman domestik dan eksternal semakin meningkat. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kejahatan ekstremis dari berbagai ideologi. Jumlah total kejahatan ekstremis meningkat hampir 4.000 pada tahun lalu, mencapai hampir 40.000 kasus, dengan pelanggaran ekstrem kanan melonjak sebesar 25%.

Laporan ini juga mencatat bahwa kelompok *Reichsbürger* dan subkelompok terkait kini memiliki sekitar 25.000 pendukung, meningkat 2.000 dari tahun lalu, dengan 10% di antaranya dinilai berpotensi melakukan kekerasan. Selain itu, laporan menunjukkan pertumbuhan "skena kanan baru" yang menggunakan media alternatif dan jejaring sosial untuk menyebarkan propaganda rasis dan revisi sejarah kepada masyarakat umum. Walaupun ekstremis kiri, meskipun jumlahnya lebih banyak tetapi kurang berbahaya, meningkat menjadi 37.000 orang, dan jumlah ekstremis Islamis tetap di angka 27.200.

Dalam konteks ini, pemerintah Jerman telah mengumumkan serangkaian langkah untuk melindungi demokrasi dan memerangi ekstremisme kanan. Pada tanggal 20 Februari 2024, Menteri Faeser bersama dengan pejabat tinggi keamanan Jerman memperkenalkan katalog langkah-langkah baru untuk memperkuat demokrasi. Langkah-langkah ini

mencakup upaya untuk memperkuat ketahanan demokrasi dengan menjaga independensi Pengadilan Konstitusi Federal dari pengaruh kekuatan anti-demokrasi, serta mengidentifikasi dan menuntut pelanggaran hukum dari individu-individu ekstremis.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memutuskan sumber pendanaan jaringan ekstremis kanan dan memperketat hukum senjata untuk mendisarmakan ekstremis. Mereka juga berencana untuk mendirikan pusat kontak untuk perlindungan pejabat municipal dan wakil rakyat, memberikan dukungan serta panduan untuk melindungi mereka yang mendukung demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sentimen anti-imigran juga telah meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan dapat memperkuat dukungan untuk ideologi ekstrem kanan di Jerman.

Pergeseran Politik

Pergeseran politik di Jerman dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama dalam hal kebijakan imigrasi, integrasi, dan hubungan dengan partai-partai politik ekstrem kanan seperti *Alternative für Deutschland* (AfD). Partai AfD yang awalnya kurang dikenal, mulai mendapatkan popularitas dan dukungan yang signifikan sejak krisis imigrasi Eropa tahun 2015. Dalam konteks ini, pergeseran politik terjadi ketika masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka mulai mendukung partai-partai dengan pandangan konservatif dan anti-imigrasi (Mudde, 2019).

Peningkatan dukungan terhadap AfD dapat dilihat sebagai respons terhadap ketidakpuasan sebagian besar populasi yang merasa terancam oleh

gelombang imigrasi besar-besaran. AfD memanfaatkan ketidakpuasan ini dengan mempromosikan agenda politik yang menolak imigrasi massal dan menuntut penguatan identitas nasional Jerman. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan-kebijakan baru yang diusulkan pemerintah, yang berupaya menyeimbangkan keterbukaan negara dengan merespons kekhawatiran masyarakat (Arzheimer, 2020).

Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) mengalami lonjakan signifikan dalam dukungan dan popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada pemilihan Eropa 2024, AfD berhasil meraih 15,9% suara, sebuah peningkatan yang signifikan dari hasil pemilihan sebelumnya, di mana mereka hanya mencatatkan 11% pada tahun 2019. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan partai, tetapi juga menandai perubahan besar dalam lanskap politik Jerman dan Eropa secara keseluruhan. AfD berhasil menarik perhatian pemilih yang merasa tidak puas dengan partai-partai mainstream dan kebijakan yang ada, menunjukkan bahwa banyak orang mulai mencari alternatif yang lebih sesuai dengan pandangan dan harapan mereka.

Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan dukungan AfD adalah ketidakpuasan yang berkembang di kalangan pemilih terkait isu-isu imigrasi, ekonomi, dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan imigrasi yang liberal dan ketidakpastian ekonomi telah menciptakan atmosfer yang mendukung retorika populis yang ditawarkan oleh AfD. Dengan memosisikan dirinya sebagai suara oposisi utama terhadap kebijakan pemerintah saat ini, partai ini menekankan

pentingnya pengetatan kontrol perbatasan dan menolak globalisasi. Pendekatan ini resonan dengan banyak pemilih yang merasa bahwa pemerintah tidak memadai dalam menangani masalah-masalah yang mereka hadapi, terutama terkait dengan dampak imigrasi dan ketidakpastian ekonomi.

Krisis migrasi yang berkelanjutan di Eropa juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan popularitas AfD. Dalam konteks ketegangan sosial dan politik yang semakin meningkat, AfD telah memanfaatkan situasi ini untuk menarik pemilih yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan menawarkan solusi yang berfokus pada kedaulatan nasional dan perlindungan terhadap kepentingan Jerman, AfD berhasil menarik perhatian pemilih yang khawatir tentang dampak dari arus migrasi dan perubahan sosial yang cepat. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk membangun narasi bahwa mereka adalah satu-satunya partai yang siap membela kepentingan rakyat Jerman.

Strategi komunikasi AfD yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan popularitasnya. Mereka telah menggunakan media sosial dan platform digital secara maksimal untuk menyebarkan pesan mereka dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kampanye politik, AfD mampu menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial. Strategi ini memungkinkan mereka untuk memperkuat dukungan dari kalangan yang merasa terabaikan oleh arus utama politik, menciptakan jaringan dukungan yang lebih solid.

Data yang menunjukkan pencapaian AfD di berbagai pemilu antara tahun 2014 hingga 2024 mencerminkan

tren ini. Dalam pemilu lokal di Sachsen pada tahun 2024, misalnya, AfD berhasil meraih 32,3% suara, menjadikannya sebagai partai terbesar di wilayah tersebut. Selain itu, dalam pemilu Eropa, peningkatan dukungan yang signifikan terlihat dengan AfD meraih 15 kursi di parlemen Eropa, meningkat dari hasil sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa AfD tidak hanya mendapatkan dukungan lebih banyak dalam hal suara, tetapi juga memperoleh pengakuan politik yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi agenda politik di tingkat Eropa.

Namun, perjalanan AfD tidak bebas dari kontroversi. Retorika ekstrem dan posisi kontroversial mereka mengenai isu-isu sosial dan politik telah memicu kritik dari berbagai kalangan. Meskipun demikian, kontroversi ini justru memperkuat citra mereka sebagai oposisi yang berani melawan arus utama, meningkatkan daya tarik bagi pemilih yang merasa frustrasi dengan sistem politik yang ada. AfD berhasil memosisikan diri sebagai pilihan bagi mereka yang ingin mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada.

Perubahan Kebijakan tentang Imigrasi dan Integrasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman telah mengalami perubahan kebijakan signifikan terkait imigrasi dan integrasi yang menjadi isu penting dalam diskusi publik dan politik. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran sikap terhadap migrasi, tetapi juga dampak dari dinamika politik domestik, termasuk pengaruh kelompok-kelompok ekstremis seperti *Alternative für Deutschland* (AfD). Memahami perkembangan ini sangat penting, terutama untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap struktur sosial dan

politik Jerman serta dampaknya terhadap kehidupan para imigran dan komunitas lokal.

Historisnya, kebijakan imigrasi Jerman dikenal dengan pendekatan yang inklusif dan humanis. Berbagai program seperti Integrasi Kursus, yang bertujuan untuk memfasilitasi integrasi sosial dan bahasa, serta undang-undang yang mendukung hak asasi manusia menjadi dasar utama kebijakan ini. Namun, munculnya tantangan global, seperti krisis pengungsi yang meningkat dan sentimen anti-imigrasi di kalangan masyarakat, memaksa pemerintah Jerman untuk meninjau kembali dan, dalam beberapa kasus, merombak kebijakan tersebut. Keterbukaan yang telah lama menjadi ciri khas kebijakan Jerman kini terpaksa menghadapi tekanan dari kekhawatiran masyarakat tentang keamanan, integrasi, dan dampak ekonomi dari imigrasi.

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan ini adalah keberhasilan partai-partai politik ekstrem kanan, khususnya AfD. Dengan retorika yang semakin menekankan pada kontrol ketat terhadap imigrasi, AfD telah berhasil mempengaruhi agenda politik utama di Jerman. Pesan-pesan yang disampaikan oleh AfD mengenai imigrasi menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan pemilih, yang pada gilirannya mendorong partai-partai politik tradisional untuk mengadopsi posisi yang lebih restriktif dalam hal kebijakan imigrasi dan integrasi.

Kebijakan baru yang diadopsi dalam beberapa tahun terakhir mencakup langkah-langkah yang lebih ketat dalam pengaturan imigrasi. Fokus kebijakan tersebut beralih kepada peningkatan keamanan perbatasan dan pemantauan latar belakang para migran. Selain itu, terdapat penekanan yang lebih besar pada integrasi ekonomi dan sosial imigran. Program-program dirancang

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi sosial imigran bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran publik sambil memastikan bahwa imigran dapat berkontribusi secara positif pada masyarakat

Namun, perubahan kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru dalam hal implementasi dan dampak sosial. Beberapa pengamat khawatir bahwa pendekatan yang lebih ketat dapat memperburuk ketegangan sosial dan mengalienasi komunitas imigran. Hal ini dapat berkontribusi pada perpecahan sosial yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting bagi program-program integrasi yang ada untuk terus diperbarui dan disesuaikan agar efektif dalam memenuhi kebutuhan imigran serta mendukung kohesi sosial yang positif.

Dalam konteks yang lebih luas, selama enam tahun terakhir, Jerman telah memainkan peran yang signifikan dalam reformasi kebijakan imigrasi dan pengelolaan migrasi di Uni Eropa. Sebagai salah satu negara anggota terkuat di Uni Eropa, Jerman memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan dan mempengaruhi kebijakan imigrasi, bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Salah satu langkah awal dalam proses ini adalah reformasi *Dublin Regulation* yang dimulai pada tahun 2018. Jerman berperan aktif dalam Dewan Uni Eropa dengan mengusulkan perubahan untuk mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan pencari suaka secara lebih merata antar negara anggota. Jerman bekerja sama dengan negara-negara seperti Prancis dan Belanda untuk membentuk koalisi yang mendukung reformasi ini, serta melakukan diplomasi bilateral untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa Timur yang skeptis terhadap perubahan tersebut.

Pada tahun 2020, Jerman mengambil peran kepemimpinan dalam

pengenalan *New Pact on Migration and Asylum*, terutama saat itu Jerman memegang presidensi Dewan Uni Eropa. Ini memberikan Jerman platform strategis untuk membentuk agenda dan mengarahkan diskusi mengenai kebijakan migrasi di antara negara-negara anggota. Melalui dialog intensif dengan negara-negara anggota lainnya, Jerman menawarkan kompromi seperti fleksibilitas dalam mekanisme solidaritas, serta mendukung negara-negara yang lebih memilih memberikan dukungan finansial daripada menerima pengungsi secara langsung. Pengaruh Jerman dalam Komisi Eropa juga berperan penting dalam merancang pakta ini, memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang didukung oleh Jerman, termasuk penguatan kontrol perbatasan eksternal dan pengelolaan migrasi yang lebih efektif.

Jerman juga memainkan peran kunci dalam revisi *EU-Turkey Statement* pada tahun 2020. Melalui negosiasi diplomatik, terutama oleh Kanselir Angela Merkel, Jerman berusaha memastikan bahwa Turki tetap berkomitmen pada perjanjian yang dirancang untuk mengurangi aliran migran ke Eropa. Dalam hal ini, Jerman berperan dalam mengamankan bantuan finansial tambahan dari Uni Eropa kepada Turki untuk mendukung penampungan pengungsi dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, Jerman berkoordinasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk memastikan dukungan luas terhadap kesepakatan ini dan mengatasi kekhawatiran terkait ketergantungan Uni Eropa pada Turki untuk mengendalikan aliran migran.

Pada tahun 2021, Jerman berfokus pada penguatan sistem pengelolaan migrasi melalui *EU Migration and Asylum Management Regulation*. Dalam proses

pengambilan keputusan di Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa, Jerman memastikan regulasi ini mendukung pengelolaan migrasi yang terkoordinasi di seluruh negara anggota. Jerman juga berperan dalam memperkuat Frontex, lembaga yang bertanggung jawab untuk pengawasan perbatasan eksternal Uni Eropa, dengan mendukung peningkatan anggaran dan mandatarinya. Selain itu, Jerman menggunakan diplomasi multilateral untuk memastikan penerimaan regulasi ini di seluruh negara anggota, memfasilitasi konsensus, dan memastikan penerapan yang konsisten.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan, Jerman memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi Frontex antara tahun 2019 dan 2021. Jerman mendukung perluasan kapasitas Frontex, baik dalam hal personel maupun sumber daya, dan memperluas mandat operasionalnya. Kolaborasi dengan negara-negara anggota lain serta penguatan standar operasional dan etika juga merupakan bagian dari upaya Jerman. Jerman berusaha memastikan bahwa Frontex beroperasi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam operasional lembaga ini.

Reformasi *Common European Asylum System* (CEAS) dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peran Jerman dalam pengembangan kebijakan yang lebih harmonis di seluruh negara anggota Uni Eropa. Jerman berpartisipasi aktif dalam pengembangan reformasi ini, mendukung harmonisasi standar prosedural dan penerapan perlindungan yang seragam. Selain itu, Jerman mengkoordinasikan implementasi reformasi dengan negara-negara anggota lain, menawarkan bantuan teknis dan pelatihan, serta menyesuaikan kebijakan

domestiknya untuk sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh CEAS.

Secara keseluruhan, Jerman telah memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan mempengaruhi kebijakan imigrasi dan reformasi Uni Eropa selama enam tahun terakhir. Melalui advokasi, diplomasi, dan kolaborasi dengan negara-negara anggota lain, Jerman berusaha untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih adil dan efektif, sambil menangani tantangan yang muncul dari krisis migrasi dan pergeseran politik di tingkat Eropa. Komitmen Jerman untuk memainkan peran proaktif dalam kebijakan migrasi Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk pengelolaan migrasi yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia.

Kebijakan terbaru terkait imigrasi di Jerman menunjukkan upaya pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang lebih ketat dan terstruktur dalam mengelola imigrasi. Misalnya, Undang-Undang Akses Pasar Tenaga Kerja untuk Pengungsi (*Beschleunigungsgesetz für Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten*) yang diperkenalkan pada tahun 2023 bertujuan untuk mempercepat integrasi pengungsi ke pasar tenaga kerja dengan mengurangi waktu tunggu untuk izin kerja dan mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan sosial. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan jumlah pengungsi yang bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja, seperti industri dan jasa. Namun, tantangan dalam pelatihan bahasa dan penyesuaian budaya masih tetap ada.

Selanjutnya, Reformasi Undang-Undang Imigrasi Tenaga Kerja Terampil yang diterapkan pada tahun 2024 memperluas cakupan tenaga kerja terampil yang dapat

berimigrasi ke Jerman dengan mencakup pekerja dengan keahlian teknis selain kualifikasi akademis tinggi. Reformasi ini juga memperkenalkan skema pelatihan kerja dan belajar yang dirancang untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor seperti konstruksi, teknologi, dan kesehatan. Meskipun implementasi

Analisis Teori Konflik Realistis dan Teori Identitas Sosial dalam Pergeseran Sosial dan Politik di Jerman

Teori Konflik Realistis menyoroti bahwa konflik antar kelompok terjadi ketika ada persaingan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks Jerman, peningkatan ekstrimisme sayap kanan dan sentimen anti-imigran dipicu oleh persepsi bahwa imigran mengancam sumber daya ekonomi dan keamanan nasional. Salah satu sumber utama ketegangan ini adalah alokasi dana yang besar oleh pemerintah Jerman untuk layanan sosial dan kebijakan integrasi bagi para imigran. Pada tahun 2020, pemerintah Jerman mengalokasikan sekitar €23 miliar untuk mendukung layanan sosial, perumahan, pendidikan, dan program integrasi bagi imigran dan pengungsi (Deutsche Welle, 2021).

Dana ini mencakup bantuan tunai, perumahan, dan program pelatihan bahasa yang ditujukan untuk mempercepat proses integrasi. Kelompok mayoritas Jerman melihat alokasi dana ini sebagai bentuk "preferensi" yang tidak adil bagi imigran, sementara mereka sendiri merasa bahwa kebutuhan ekonomi mereka terabaikan. Ketegangan ini menyebabkan semakin meningkatnya sentimen anti-imigran, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada kepentingan imigran daripada kesejahteraan penduduk asli. Seperti yang dijelaskan oleh Sherif, "Konflik antar

kelompok dapat timbul karena adanya kompetisi nyata atau yang dipersepsikan atas sumber daya yang terbatas" (Sherif, 1966). Dana yang besar yang dialokasikan 91 untuk layanan sosial dan integrasi memperkuat persepsi bahwa imigran adalah pesaing langsung atas sumber daya publik yang seharusnya didistribusikan secara lebih merata di antara seluruh warga negara, termasuk kelompok mayoritas.

Teori Identitas Sosial juga relevan dalam menjelaskan bagaimana kelompok mayoritas Jerman memandang alokasi sumber daya ini sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Ketika imigran diberikan prioritas dalam program layanan sosial, kelompok mayoritas merasa bahwa status mereka dalam masyarakat terancam. Menurut Tajfel, ancaman terhadap status sosial sebuah kelompok akan memperkuat identitas kelompok tersebut dan meningkatkan polarisasi antara in-group dan out-group (Tajfel, 1978). Dalam hal ini, imigran menjadi target utama diskriminasi dan tindakan kebencian, karena mereka dianggap mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah yang seharusnya diberikan kepada warga asli.

Selain ketakutan terhadap ekonomi dan keamanan, perubahan demografi yang mencakup ras, budaya, dan agama memperburuk perasaan terancam ini. Gelombang besar imigran dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia telah membawa perubahan signifikan dalam komposisi ras di Jerman, yang sebelumnya didominasi oleh kelompok mayoritas kulit putih Eropa. Perubahan rasial ini memicu kekhawatiran bahwa Jerman akan kehilangan karakter etnisnya yang bersejarah. Teori konspirasi seperti "*Great Replacement*" sering digunakan oleh kelompok sayap kanan untuk menggambarkan ketakutan bahwa imigrasi massal akan menggantikan

penduduk asli dengan kelompok rasial lain, dan identitas Jerman akan hilang.

Dalam aspek budaya dan agama, pertumbuhan populasi Muslim di Jerman akibat gelombang imigrasi besar-besaran juga menjadi sumber ketakutan. Kelompok mayoritas yang beragama Kristen melihat ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Jerman. Partai AfD sering menggunakan narasi "Islamisasi Barat" untuk menggambarkan bagaimana budaya dan agama Jerman sedang digantikan oleh pengaruh imigran Muslim, yang mereka klaim dapat merusak kohesi sosial. Menurut Tajfel, ancaman ini meningkatkan solidaritas in-group dan memperkuat perlawanan terhadap kelompok imigran yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya dan agama Jerman.

Aspek ketakutan terhadap keamanan juga semakin memperburuk hubungan ini. Selain dianggap mengancam kesejahteraan ekonomi, imigran juga dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Beberapa kasus kriminal dan serangan terorisme yang melibatkan imigran semakin memperkuat kekhawatiran ini. Selain itu, kekhawatiran tentang jaringan teroris yang terlibat dengan pengungsi asal Timur Tengah juga memicu ketakutan akan meningkatnya risiko terorisme di Jerman. Dalam survei yang dilakukan pada tahun 2020, ditemukan bahwa "sekitar 70% warga Jerman percaya bahwa imigran meningkatkan risiko terorisme dan kejahatan di negara tersebut" (Müller, 2020).

Narasi seperti ini dimanfaatkan oleh partai-partai politik populis seperti AfD, yang menyuarakan bahwa imigran adalah ancaman besar bagi keamanan nasional dan mempromosikan kebijakan yang lebih proteksionis. Dukungan terhadap partai sayap kanan seperti AfD

juga dapat dijelaskan melalui 93 kombinasi dari kedua teori ini. AfD memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap alokasi sumber daya yang dianggap terlalu banyak diberikan kepada imigran, serta ketakutan akan keamanan nasional dan perubahan demografi. Partai ini mengusung retorika proteksionis yang menekankan bahwa kepentingan warga asli harus diutamakan daripada imigran, baik dalam hal ekonomi, keamanan, ras, budaya, maupun agama.

Dalam hal ini, Teori Konflik Realistis menjelaskan bahwa persaingan atas sumber daya (seperti dana layanan sosial) memperburuk ketegangan antar kelompok, sedangkan Teori Identitas Sosial menjelaskan bagaimana kelompok mayoritas membangun narasi bahwa identitas, ras, dan budaya mereka harus dipertahankan dari ancaman imigran. Kombinasi dari konflik atas sumber daya, ancaman terhadap identitas, serta perubahan ras, budaya, dan agama ini menjelaskan mengapa fenomena seperti hate crime, sentimen anti-imigran, dan dukungan terhadap AfD saling terkait. Konflik ekonomi yang digambarkan oleh Teori Konflik Realistis memperburuk polarisasi identitas, yang pada gilirannya memperkuat tindakan diskriminatif dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang lebih proteksionis.

KESIMPULAN

Kebijakan *Open Door Policy* yang diberlakukan Jerman pada tahun 2015 berdampak signifikan terhadap perubahan sosial dan politik. Pada awalnya, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dari negara-negara konflik sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kemanusiaan. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan ketegangan sosial dan politik. Secara sosial, kebijakan ini memicu ketegangan antara kelompok pendukung

dan penentang imigrasi, yang memperburuk insiden ekstremisme kanan serta berdampak pada sektor pendidikan dan layanan sosial. Dari sisi politik, terjadi peningkatan dukungan terhadap partai sayap kanan seperti *Alternative für Deutschland* (AfD), dan pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan kemanusiaan dengan keamanan domestik. Secara keseluruhan, *Open Door Policy* mencerminkan tantangan besar dalam mengelola krisis imigrasi sambil mempertahankan stabilitas sosial dan politik, serta menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk menghadapi dinamika yang kompleks di masa mendatang.

SARAN

Pemerintah Jerman perlu memperkuat strategi integrasi pengungsi agar mereka dapat berkontribusi secara positif tanpa menimbulkan ketegangan. Kebijakan integrasi yang efektif harus mencakup akses pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan sosial yang lebih baik bagi para pengungsi. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat lokal perlu ditingkatkan guna mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman mengenai manfaat imigrasi.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menyeimbangkan keamanan nasional dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini termasuk penguatan kontrol perbatasan dan sistem pemeriksaan migrasi untuk lebih efektif mengelola arus pengungsi. Pendekatan holistik ini akan membantu meredakan kekhawatiran publik sambil tetap menghormati kewajiban internasional.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang *Open Door Policy* terhadap integrasi sosial dan ekonomi pengungsi di Jerman, serta melakukan komparasi internasional dengan kebijakan

serupa di negara lain. Penelitian tersebut akan memberikan wawasan lebih dalam tentang praktik terbaik dalam menangani krisis migrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarosa, Emanuele & Benjamin Elsner. (2022). *Forced Migration, Social Cohesion and Conflict: The 2015 Refugee Inflow in Germany*. Policy Research Working Paper 9913.
- Bauder, H. (2017). *Migration, Borders, Freedom*. New York, NY: Routledge.
- Bernt, M. (2017). Political realignment in Germany: The rise of AfD. *German Politics Journal*.
- Bhikhu Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- Blume, T. (2019). Integrating migrants into German society: Challenges and strategies. *Policy and Society*.
- Brücker, H., & Rother, N. (2018). The labor market integration of refugees in Germany. *European Economic Review*.
- Boyer, J. (2021). *Germany's Trade Policies and Internal Integration*. London, England: Routledge.
- Boese, M. (2019). Economic strain and anti-immigrant sentiment in Europe. *European Journal of Political Economy*.
- Brubaker, R. (2018). *The Politics of Immigration: Public Opinion, Policy, and Electoral Success*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Browning, C. S. (2018). *The Rise of the New Internal Powers: Germany's Role in International Trade*. London, England: Palgrave Macmillan.
- Castles, S., & Miller, M. J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the*

- Modern World*. New York, NY: Guilford Press.
- Dahrendorf, R. (2016). *Society and Democracy in Germany*. Cambridge, England: Polity Press.
- Deutsche Welle. (2021). *German Government Spending on Migration and Integration*. Berlin: DW Publications.
- Eisenstadt, S. N. (2000). *Modernization: The Dynamics of Growth and Change*. Oxford, England: Wiley-Blackwell.
- Esser, H. (2016). *Migration, Language and Integration*. Mannheim, Germany: University of Mannheim.
- Esses, V. M., Dovidio, J. F., & Jackson, L. M. (2001). The Immigration Dilemma: The Role of Perceived Group Competition, Ethnic Prejudice, and National Identity. *Journal of Social Issues*, 57(3).
- Fairbank, J. K., & Goldman, M. (2006). *China: A New History*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Fuchs, R. (2018). The economic impact of immigration in Germany. *Journal of Labor Economics*.
- Giddens, A. (2006). *Sociology* (5th ed.). Cambridge, England: Polity Press.
- Gerwarth, R. (2018). *The Politics of Imperialism: Germany and the Asia-Pacific*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Givens, T. E., & Luedtke, A. (2005). European immigration policies in comparative perspective: Issue salience, partisanship and immigrant rights. *Comparative European Politics*, 3(1), 1-22.
- Haug, S. (2018). The effects of migration on social cohesion in Germany. *Migration Studies Journal*.
- Hansen, R. (2017). *Immigration and the Politics of Citizenship in Europe*. London, England: Routledge.
- Hollifield, J. F. (2018). *Immigration and the Politics of Citizenship in Europe*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Huntington, S. P. (2004). *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Katzenstein, P. J. (2017). *A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kissinger, H. (2011). *On China*. London, England: Penguin Books.
- Krause, J. (2019). East-West divide in Germany's immigration perception. *Sociological Review*.
- Kronenfeld, D. (2020). *Internal Trade Policies and Open Door Principles*. London, England: Routledge.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Liu, X., & Zheng, Y. (2011). *The Boxer Rebellion and the Fall of the Qing Dynasty*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Maier, C. S. (2008). *Recasting the European Order: Germany and International Relations*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Macionis, J. J. (2011). *Sociology* (14th ed.). Boston, MA: Pearson.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.
- Merkel, A. (2017). Christian Democratic Union's position on immigration. *Policy Analysis Report*.
- Monika, Santi. (2021). Dampak Krisis Pengungsi pada Tahun 2015 terhadap Keamanan Negara Jerman. Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Mudde, C. (2016). *The Populist Radical Right: A Reader*. London, England: Routledge.
- Mudde, C. (2018). The radical right in Germany: A growing threat? *New Political Science*.
- Müller, F. (2020). *Migration and Security in Germany*. Berlin: Springer.
- Müller, J. (2019). The politics of memory in postwar Europe. In *Cultural Memory Studies* (pp. 35-42). Cham, Switzerland: Springer.
- Münz, R., & Ulrich, R. (2017). What are the demographic prospects for the European Union?. *Population & Policy Compact*.
- Paterson, W. E. (2019). *Germany and the European Union: Trade, Politics, and Integration*. London, England: Routledge.
- Raharjo, Lintang Wahyu Charisa, et al. (2023). Identitas Masyarakat Eropa dalam Uni Eropa dan Problematika Terkait Imigran Non-Eropa. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*.
- Schneider, S., et al. (2017). Crime and immigration in Germany. *Journal of European Social Policy*.
- Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2017). *The Politics of European Union Enlargement*. London, England: Routledge.
- Schneider, S. L. (2018). The integration of immigrants into society: A study of policies and outcomes. Cham, Switzerland: Springer.
- Sherif, M. (1966). *Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology*. New York, NY: Routledge.
- Shin, G. W. (2005). *The Open Door Policy and the Rise of American Imperialism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Steinmayr, A. (2019). The impact of immigration on voting behavior in Germany. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tajfel, H. (1978). *Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations*. London: Academic Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.
- Thränhardt, D. (2018). Immigration and economic inequality in Germany. *Economic Studies Quarterly*.
- Voss, T. (2019). *Social Integration and the Refugee Crisis in Germany*. Cham, Switzerland: Springer.
- Weber, L. (2020). *The Rise of the Right: Populism and Politics in Europe and the USA*. London, England: Bloomsbury Publishing.
- Wodak, R. (2017). *Migration and Crime in Germany*. Freiburg, Germany: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law.